

LAPORAN TAHUNAN 2021



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat petunjuk dan rahmat-Nya menjadikan laporan tahunan ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Tahunan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) disajikan bertujuan untuk memberikan informasi tentang kinerja dan kegiatan asosiasi, serta memberikan gambaran singkat mengenai rencana kerja di tahun berikutnya. Laporan tahunan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ini berisi pula laporan keuangan ASPI per 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan, *Certified Public Accountant* (CPA), dengan opini audit : “Wajar”, dalam semua hal yang material. Demikian kami sampaikan pengantar ini dan untuk informasi lebih lanjut mengenai ASPI dapat menghubungi :

Sekretariat ASPI

Gd. Graha Mandiri Lt. 18
Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat 10310
Telp: (62-21) 230 1947 / (62-21) 230 1829
Fax: (62-21) 230 0393
Email: sekretariat@aspi-indonesia.or.id
Website: <https://www.aspi-indonesia.or.id/>

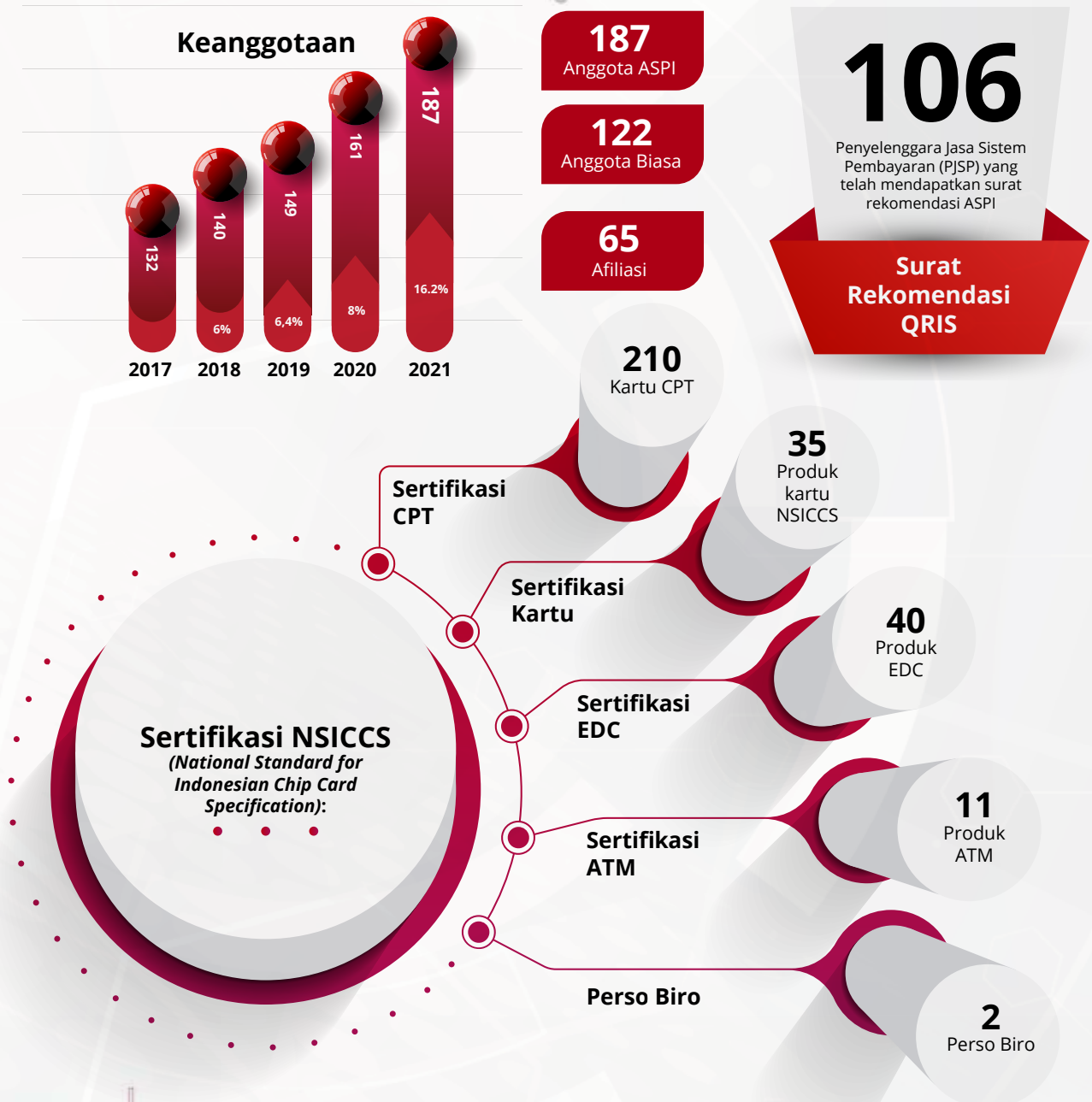
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
KILAS KINERJA ASPI 2021	3
LAPORAN MANAJEMEN	7
Laporan Badan Pengawas	8
Laporan Badan Pengurus.....	11
BAB 1: PROFIL ASOSIASI.....	17
Sekilas ASPI.....	18
Visi dan Misi.....	18
Peran dan Komitmen ASPI	19
Profil Badan Pengawas	20
Profil Badan Pengurus	22
Profil Direktur Eksekutif.....	26
BAB 2: PERKEMBANGAN ASOSIASI	29
Perkembangan Keanggotaan.....	30
Komposisi Bank dalam Keanggotaan ASPI.....	30
Komposisi Non-Bank dalam Keanggotaan ASPI	30
Rapat Umum Anggota ASPI	31
BAB 3: KINERJA & KEGIATAN ASPI 2021	33
Pengembangan Produk	34
Penyusunan dan Penerbitan KASPI dan BASPI.....	35
Fungsi Pengelolaan Sertifikasi & Rekomendasi	36
Pengelolaan Standar <i>NSICCS</i>	36
<i>Member Engagement and Communication Program</i>	36
Membangun Infrastruktur Sistem Teknologi Internal ASPI	37
Pengkian Website ASPI	37
BAB 4: RENCANA KEGIATAN ASPI 2022	39
Mendukung Implementasi <i>Blueprint</i> Sistem Pembayaran Indonesia 2025	40
Mendukung Implementasi Inisiatif Strategis di Sistem Pembayaran	40
<i>Member Engagement and Communication Program</i>	41
KASPI	41
Pengembangan Internal ASPI	41
BAB 5: LAPORAN KEUANGAN.....	43



KILAS KINERJA 2021

PENCAPAIAN ASPI HINGGA TAHUN 2021



KEGIATAN ASPI TAHUN 2021

FEBRUARI 2021



QRIS 12 Juta Merchant (Februari 2021)

MARET 2021



ASPI Virtual Member Forum (24 & 25 Maret 2021)

MARET 2021

Menerbitkan Buletin ASPI No 3/III/2021 sebagai acuan penampilan QRIS MPM di berbagai media.

Pada 24-25 Maret 2021 ASPI Menyelenggarakan *Member Forum* untuk membahas strategi pengembangan QRIS untuk mencapai target 12 juta *merchants*.

APRIL 2021

Pengenalan fitur QRIS TTS (Transfer, Tarik Tunai dan Setor).

JUNI 2021

Pada 23 JUNI 2021 ASPI Menyelenggarakan RUA dan menyetujui penambahan jabatan pada struktur asosiasi yaitu Komisaris Independen.



RUA ASPI (23 Juni 2021)

AGUSTUS 2021

Penerapan *NSICCS Certificate Authority Public Key* 1984-bit.

Pada 17 Agustus 2021 dilaksanakan Peluncuran SNAP (Sistem Nasional *Open API*) dan *Soft Launch QRIS Crossborder*.

NOVEMBER 2021

Pada 3 November 2021 ASPI Menyelenggarakan Webinar "Membangun Kolaborasi Pelaku Industri Sistem Pembayaran Dalam Menangani Tindak Kejahatan Pembayaran Digital."



Webinar "Membangun Kolaborasi Pelaku Industri Sistem Pembayaran Dalam Menangani Tindak Kejahatan Pembayaran Digital" (03 November 2021)

DESEMBER 2021

21 Desember 2021 dilaksanakan Peluncuran BI FAST serta penerbitan KASPI Kerjasama Bank Sponsor dan PTL BI FAST dan KASPI Penanganan Permasalahan Transaksi BI FAST.

31 Desember 2021 merupakan batas akhir tahapan implementasi *non chip* NSICCS, dimana mulai 1 Januari 2022 seluruh kartu ATM dan/atau kartu debit beserta terminalnya harus menggunakan standar berteknologi *chip* NSICCS.



Peluncuran BI FAST (21 Desember 2021)

LAPORAN MANAJEMEN



LAPORAN BADAN PENGAWAS



Kartika Wirjoatmodjo
Ketua Badan Pengawas

Para Anggota ASPI yang kami hormati,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah berhasil melewati tahun 2021 dengan baik.

Atas nama jajaran Badan Pengawas, dengan rasa bangga saya menyampaikan bahwa di tahun 2021 ASPI telah melaksanakan serangkaian program dan inisiatif yang mendukung kemajuan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Disamping itu, ASPI juga telah berpartisipasi secara aktif dalam mendukung program-program kerja Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI).

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga tahun 2021, memberikan dampak yang signifikan pada kondisi perekonomian baik global maupun nasional. Namun disisi lain, pandemi juga memberikan manfaat percepatan transformasi digitalisasi pembayaran.

Hal ini terlihat dari meningkatnya transaksi belanja menggunakan QRIS dengan pertumbuhan yang sangat tajam hingga 300% dalam tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Transaksi menggunakan kartu juga tercatat tumbuh 9,7% menjadi Rp7.921 triliun di tahun 2021 dari tahun sebelumnya sebesar Rp7.155 triliun, sedangkan transaksi uang elektronik tumbuh hampir 50% mencapai Rp305 triliun. Peningkatan transaksi pembayaran yang cukup tinggi ini memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 3,69% yang mana merupakan salah satu terbaik di Asia.

Peranan ASPI sebagai mitra strategis Bank Indonesia sekaligus sebagai representasi pelaku industri pembayaran akan semakin penting dalam mendorong adopsi berbagai solusi digital pada sistem pembayaran di Indonesia secara lebih luas, melalui pengembangan produk dan kebijakan yang dimiliki.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA BADAN PENGURUS

Badan Pengawas menilai bahwa kinerja Badan Pengurus di tahun 2021 sangat baik, yang tercermin dari pencapaian target-target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam program kerja ASPI. Di sepanjang tahun pelaporan, tugas dan wewenang kepengurusan telah dijalankan Badan Pengurus dengan penuh tanggung jawab dan selaras dengan arahan Badan Pengawas serta sejalan dengan program Bank Indonesia dalam melaksanakan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yang bertujuan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

PENCAPAIAN TAHUN 2021

Beberapa inisiatif strategis ASPI telah berhasil diimplementasikan pada tahun 2021, dimana melalui sinergi dan kolaborasi dari para pelaku industri serta dukungan para pemangku kepentingan telah terbentuk ekosistem sistem pembayaran yang lebih maju dan efisien.

Pemulihan ekonomi Indonesia khususnya upaya peningkatan ketahanan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) selama masa pandemi menjadi fokus utama dalam merealisasikan inisiatif strategis ASPI. Dalam hal ini ASPI telah melakukan berbagai pengembangan standar QRIS, seperti menambahkan beberapa fitur untuk mengakomodir transaksi Transfer, Tarik Tunai, dan Setor (TTS), serta transaksi QRIS *Crossborder*.

Secara proaktif ASPI turut mendorong pencapaian program 12 juta *merchant*, dimana pada akhir tahun 2021 telah tercatat sebanyak 14,8 juta *merchant* QRIS. Lebih jauh, pembebasan MDR *fee* kepada *merchant* UMKM diharapkan dapat membantu UMKM mengatasi kesulitan di masa pandemi.

Untuk memperkuat sistem pembayaran ritel, ASPI mendukung implementasi BI-FAST yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai infrastruktur pembayaran yang lebih maju, efisien dan *instant* 24x7.

Standar Open API Pembayaran (atau dikenal juga sebagai SNAP) yang dikembangkan oleh ASPI bersama Bank Indonesia, beserta perwakilan industri telah ditetapkan sebagai standar nasional dan ditargetkan untuk implementasi di tahun 2022. SNAP dibangun sebagai sarana berinovasi dan berkolaborasi antara perbankan dan *fintech*.

Dalam menjalankan perannya sebagai SRO, ASPI telah mengeluarkan beberapa ketentuan dan pedoman untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, antara lain ketentuan sehubungan dengan BI-FAST, QRIS dan *Key Management/Certificate Authority*.

RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Di tahun 2022 ASPI akan melaksanakan rencana kegiatan yang merupakan kelanjutan dan perwujudan dari *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia dan inovasi-inovasi baru pada layanan dan produk digital lainnya yang diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi, diantaranya ialah pengembangan fitur dan perluasan penggunaan QRIS, implementasi SNAP bagi pelaku industri lainnya (*next mover*), perluasan implementasi BI-Fast untuk mengikutsertakan seluruh perbankan, melakukan kajian untuk diterapkannya teknologi pembayaran berbasis *contactless*, dan mendukung pelaksanaan rencana penerapan sistem transportasi terpadu dengan menggunakan pembayaran non tunai.

Dengan dinamika industri pembayaran di Indonesia yang terus berkembang pesat, ASPI diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dan merespon peluang yang terbuka untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

APRESIASI DAN PENUTUP

Atas nama Badan Pengawas, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-setingginya kepada Badan Pengurus dan seluruh Karyawan ASPI atas dedikasi dan komitmen yang telah diberikan demi terlaksananya program-program ASPI.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bank Indonesia serta seluruh anggota ASPI yang telah memberikan kepercayaan, dukungan dan bersinergi bersama kami, sehingga tahun 2021 menjadi sebuah tantangan yang sekaligus keberhasilan bagi ASPI.

Kami berharap ASPI dapat terus mengawal kemajuan sistem pembayaran nasional, serta mendukung pelaksanaan program-program inisiatif untuk pertumbuhan sistem pembayaran di Indonesia.

Terima Kasih
Jakarta, April 2021

Kartika Wirjoatmodjo
Ketua Badan Pengawas

LAPORAN BADAN PENGURUS

Para Anggota ASPI yang kami hormati,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkah dan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kita semua, sehingga ASPI dapat melalui berbagai tantangan dan mencatat pencapaian kinerja yang baik untuk Tahun Buku 2021.

Di tahun pelaporan perjalanan perekonomian nasional masih diwarnai kondisi Covid-19, namun berbagai perubahan dan penyesuaian pada pola aktivitas di masyarakat terus terjadi, dimana penerapan teknologi digital dilaksanakan hampir pada semua sektor perekonomian termasuk sistem pembayaran. Digitalisasi sistem pembayaran menjadi salah satu faktor pendorong pemulihan ekonomi nasional karena dapat memfasilitasi kebutuhan bertransaksi di masyarakat saat pandemi.

Dengan ikut berkembangnya digitalisasi dalam sistem pembayaran, kehadiran produk-produk yang telah dikembangkan oleh ASPI di tahun 2021 seperti *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) menjadi solusi di tengah situasi yang menuntut sistem pembayaran yang cepat, aman, dan andal, serta tanpa kontak fisik. Hal ini ditandai dengan peningkatan yang cukup tinggi dari transaksi QRIS selama masa pandemi. Disamping itu, pengembangan *Standard National Open API Pembayaran* (SNAP) dan juga penerapan BI-FAST diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kemajuan sistem pembayaran.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) dan Lembaga Standar, di tahun 2021 ASPI telah melaksanakan berbagai program dan inisiatif guna mendukung kelancaran dan kemajuan sistem pembayaran nasional di Indonesia, antara lain:

KINERJA ASPI TAHUN 2021

Pengembangan Produk:

- **Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)**
ASPI dengan dukungan anggotanya yang merupakan perwakilan dari pelaku industri sistem pembayaran telah menyelesaikan penyusunan standar *Consumer Presented Mode* (CPM) yang merupakan metode lainnya dari QRIS. Di samping itu QRIS MPM juga dikembangkan untuk mengakomodasi transaksi pembayaran antar negara (QRIS *Crossborder*), dimana pada tahap awal



Santoso
Ketua Umum ASPI

kerjasama dilakukan dengan Thailand dan diluncurkan di bulan Agustus 2021.

- Standar Nasional Open API - Pembayaran (SNAP)**
Bersama Bank Indonesia dan beberapa perwakilan industri, ASPI telah menyusun *Standard Open API* untuk Pembayaran (SNAP), yang merupakan Standar Teknis & Keamanan, Standar Data & Spesifikasi Teknis serta Pedoman Tata Kelola. SNAP dijadwalkan untuk diterapkan secara bertahap mulai 1 Juli 2022 dengan peserta *first-mover*. SNAP akan membangun harmonisasi *linkage* antara bank dan *fintech* serta mendorong inovasi dalam sistem pembayaran yang pada akhirnya menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang berintegritas.

Penerbitan Ketentuan ASPI

Dalam menjalankan fungsi SRO di bidang sistem pembayaran dan dalam rangka mendukung implementasi BI-FAST yang diluncurkan Bank Indonesia di penghujung tahun 2021, telah diterbitkan 2 (dua) Ketentuan ASPI (KASPI), yaitu KASPI tentang Kerjasama Bank Sponsor dan Peserta Tidak Langsung dalam Menggunakan BI-FAST, dan yang kedua KASPI tentang Penanganan Permasalahan Transaksi Transfer Dana Melalui BI-FAST.

Lebih jauh ASPI juga telah menerbitkan beberapa ketentuan lainnya dalam bentuk pedoman dan buletin, termasuk buletin mengenai tampilan QRIS MPM yang bertujuan untuk memudahkan pengenalan QRIS oleh konsumen atau pengguna sehingga slogan "SATU QRIS UNTUK SEMUA" dapat tersampaikan dengan baik.

Implementasi secara penuh Standar Nasional Teknologi Chip (SNTC)

Untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia, ASPI secara proaktif memantau dan memberikan peringatan kepada pelaku industri sehubungan dengan batas waktu penggunaan teknologi *chip* NISCCS pada kartu ATM dan/atau Debit serta terminal ATM/EDC. Berdasarkan laporan yang diterima oleh ASPI per 31 Desember 2021 hanya 1 (satu) bank yang belum memenuhi ketentuan Bank Indonesia dalam penerapan 100% teknologi *chip*. Kewajiban menggunakan teknologi *chip* diterapkan untuk meningkatkan keamanan bertransaksi dengan Kartu ATM/Kartu Debit.

Penerapan NSICCS Certificate Authority Public Key 1984-bit

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan *Key Management* yang merupakan salah satu tugas ASPI sebagai Lembaga Standar, telah diterbitkan CA Key 1984-bit dengan masa berlaku hingga akhir tahun 2030. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan memberikan pilihan bagi penerbitan kartu dengan periode yang lebih panjang. Sehubungan dengan penerapan CA *Public Key* ini ASPI telah mengeluarkan buletin di bulan Mei 2021.

Keanggotaan ASPI

Di tahun 2021, keanggotaan ASPI telah meningkat sebesar 16% dari 161 (seratus enam puluh satu) anggota per Desember 2020, menjadi 187 (seratus delapan puluh tujuh) anggota pada akhir tahun 2021. Sebagian besar anggota yang bergabung berasal dari institusi non-Bank.

Member Engagement and Communication Program

Untuk meningkatkan kolaborasi pelaku sistem pembayaran dan menjalin komunikasi dengan para anggota, ASPI telah menyelenggarakan webinar pada bulan Maret dan November 2021. Selain itu ASPI juga menerbitkan *newsletter* secara berkala untuk memberikan informasi terkini mengenai perkembangan sistem pembayaran kepada anggotanya.

Pengembangan Infrastruktur dan Pengkinian website ASPI

Untuk meningkatkan proses efisiensi dan keamanan sistem internal ASPI, ASPI telah meningkatkan kemampuan dan kapasitas sistem infrastrukturnya (*hardware/software*) serta melakukan pengkinian dan pengembangan pada *website* ASPI agar dapat memudahkan anggota ASPI mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan ASPI.

PENGELOLAAN KEUANGAN ASPI TAHUN 2021

Sepanjang 2021, ASPI membukukan pendapatan sebesar Rp25,5 miliar, naik sebesar Rp5,1 miliar (25%) dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp20,4 miliar. Sumber utama pendapatan berasal dari MDR *fee* sebesar Rp14,1 miliar dan iuran keanggotaan sebesar Rp6,6 miliar. Sedangkan untuk

pengeluaran, terdapat peningkatan sebesar Rp1,8 miliar (11,6%) dengan total pengeluaran sebesar Rp17,2 miliar, peningkatan disebabkan oleh kenaikan biaya SDM dan pembukuan biaya Imbal Pasca Kerja. Per akhir tahun 2021, ASPI berhasil membukukan total aset sebesar Rp36,3 miliar atau mengalami pertumbuhan 30% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp27,9 miliar. Dalam hal pengelolaan keuangan selama tahun 2021, ASPI tetap berpegang pada prinsip kemandirian, profesional, akuntabel dan efisiensi secara berkelanjutan.

RENCANA KERJA ASPI TAHUN 2022

Untuk menjalankan program-program strategis ASPI dan mendukung pelaksanaan inisiatif yang tertuang dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025, program-program di bawah ini direncanakan oleh ASPI untuk dijalankan pada tahun 2022 dengan berkolaborasi secara intensif dengan anggota, regulator, dan pihak-pihak lainnya yang terkait mengenai Sistem Pembayaran Indonesia untuk menciptakan sistem pembayaran yang cepat, efisien, aman, dan berkesinambungan.

Contactless:

Guna memenuhi kebutuhan industri yang lebih efisien dan aman, serta memberikan pilihan kepada masyarakat atas tersedianya instrumen pembayaran yang lebih beragam, yang juga membawa industri pembayaran di Indonesia setara dengan industri pembayaran di negara lainnya maka akan dikembangkan standar untuk pembayaran berbasis teknologi nirsentuh (*contactless*). Pada tahap awal di tahun 2022, akan dilakukan kajian untuk standar *Contactless*.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS):

ASPI secara berkesinambungan akan mengembangkan lebih jauh standar QRIS untuk mendorong pertumbuhan transaksi digital baik di dalam negeri maupun manca negara melalui penambahan fitur QRIS untuk memfasilitasi transaksi Transfer, Tarik Tunai, dan Setor (TTS), serta membangun kerjasama dengan negara tetangga untuk memperkenalkan penggunaan QRIS kepada turis asing. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan bisnis UMKM dan pariwisata di Indonesia. Pada tahun 2022, kerjasama akan direalisasikan secara penuh dengan Thailand dan Malaysia, dan juga akan dijajaki dengan beberapa negara lain diantaranya Singapura, Korea Selatan, dan UPI-China.

Standard Open API untuk Pembayaran (SNAP):

ASPI akan melakukan persiapan untuk pengelolaan *developer site* dan penanganan kegiatan verifikasi SNAP yang saat ini masih dikelola oleh Bank Indonesia. ASPI sepenuhnya mendukung implementasi SNAP sesuai *timeline* yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, guna terbentuknya sinergi antar bank dan non-bank.

Pendaftaran Auditor TI & Keamanan:

Persiapan akan dilakukan oleh ASPI dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia, dimana ASPI ditugaskan untuk menangani pendaftaran Auditor yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk melakukan Audit TI & keamanan terhadap sistem dan operasional PJP/PIP.

Multi Lane Free Flow (MLFF):

ASPI bersama-sama dengan Bank Indonesia, pelaku industri, dan pengelola jalan tol akan membantu penerapan dan pengoperasian *Multi Lane Free Flow* (MLFF) yang merupakan sistem tanpa gerbang yang akan dipergunakan di jalan tol.

Ketentuan ASPI:

Menyusun dan menerbitkan beberapa ketentuan teknis dan mikro terkait sistem pembayaran antara lain KASPI *liability shift*, KASPI Penanganan Transaksi *Fraud*, dan Buletin mengenai sosialisasi QRIS kepada *merchant*.

Sosialisasi dan Edukasi Anggota:

Untuk meningkatkan pemahaman atas produk standard, kebijakan, dan ketentuan yang dikeluarkan, ASPI akan mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada Anggotanya dan pihak terkait.

APRESIASI DAN PENUTUP

Mewakili seluruh jajaran Badan Pengurus, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota ASPI atas kontribusi dan kerjasama yang diberikan sehingga ASPI dapat mencapai hasil yang menggembirakan. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Tim Pelaksana Operasional ASPI atas kerja keras dan dedikasinya dalam menjalankan program ASPI dan melayani kebutuhan segenap anggota ASPI.

Terima kasih kami ucapkan kepada Badan Pengawas ASPI atas arahan, pengawasan, serta nasihat yang diberikan kepada Badan Pengurus sehingga kami mampu membuat dan mengaplikasikan kebijakan strategis di tahun 2021.

Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan penuh

kepada ASPI, sehingga ASPI mampu menjalankan perannya dengan baik. ASPI berkomitmen untuk terus mendukung visi Bank Indonesia guna mewujudkan sistem pembayaran Indonesia yang cepat, mudah, aman, dan andal dengan konsep terinterkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi para anggota khususnya, dan masyarakat Indonesia secara umum.

Terima Kasih
Jakarta, April 2021

Santoso
Ketua Umum ASPI

BADAN PENGAWAS ASPI



BADAN PENGURUS ASPI



DIREKTUR EKSEKUTIF DAN TIM PELAKSANA





1 PROFIL ASOSIASI

SEKILAS ASPI

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ("Asosiasi") atau ASPI didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris DR. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM No. 10 tanggal 20 Oktober 2010 di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh seluruh anggota ASPI dalam Rapat Umum Anggota (RUA) tanggal 28 Oktober 2011.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam industri sistem pembayaran, dibutuhkan ketentuan/peraturan yang tepat, cepat dan mampu mengakomodir perkembangan terkini dari penyelenggaraan sistem pembayaran dari berbagai sisi baik bisnis maupun teknis. Di satu sisi, Bank Indonesia selaku

otoritas di bidang sistem pembayaran memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran secara menyeluruh di Indonesia. Di sisi lain, sebagai mitra Bank Indonesia, asosiasi memiliki peran, tugas, dan fungsi dalam lingkup mikro dan teknis untuk membuat ketentuan dalam industri sistem pembayaran yang mampu mewadahi berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi dengan tetap memperhatikan peraturan dan kebijakan Bank Indonesia. Peran, tugas dan fungsi yang dimiliki asosiasi untuk mengeluarkan ketentuan tersebut didasarkan pada kesepakatan, amanat dan mandat dari pelaku sistem pembayaran yang menjadi anggota asosiasi.

VISI DAN MISI

Visi

Mewujudkan Sistem Pembayaran Nasional yang lebih efisien, aman, andal, cepat, dan terintegrasi dalam menuju *Less Cash Society*.

Misi

1

Menjadi *Self Regulatory Organization* yang independen dan terpercaya dalam pengaturan kebijakan teknis untuk membangun sistem pembayaran nasional yang aman dan andal.

2

Menjadi mitra strategis Bank Indonesia yang profesional.

3

Menjadi wadah aspirasi yang terpercaya bagi industri sistem pembayaran nasional.

4

Menjadi penyelaras kebijakan ASPI yang mengarah kepada terwujudnya *Cashless Society*.



PERAN DAN KOMITMEN ASPI

Sebagai *Self Regulatory Organization* yang merupakan representasi pelaku industri sistem pembayaran sekaligus mitra strategis BI, ASPI berkomitmen untuk mendukung implementasi transformasi digital sesuai

visi Bank Indonesia yang tertuang dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 melalui 3 pendekatan dibawah ini:

Action

Terlibat secara proaktif dalam menyusun standar, merumuskan rencana aksi, dan berkolaborasi dalam implementasi rencana aksi untuk akselerasi terwujudnya pembayaran digital yang universal dan inklusi.



Advocacy

Merupakan representasi 'suara' industri dan melindungi kepentingan anggota ASPI dalam konteks mewujudkan Visi Sistem Pembayaran Nasional yang berkesinambungan secara efektif sesuai dengan meningkatkan resiliensi dan daya saing industri sistem pembayaran nasional, *international leading practices* dan tata kelola industri yang baik.

Awareness

Bertindak proaktif dalam merancang paket sosialisasi informasi dan kajian potensi dampak/manfaat bagi pelaku industri/anggota ASPI dan memberikan edukasi masyarakat bekerjasama dengan anggota ASPI.

PROFIL BADAN PENGAWAS



Kartika Wirjoatmodjo
Ketua

Diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas ASPI yang mewakili Perhimpunan Bank-Bank Nasional (PERBANAS) untuk periode 2019 - 2022. Beliau menjabat sebagai Wakil Menteri di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero), Tbk periode 2016 - Oktober 2019, sebagai Direktur *Finance & Strategy* PT Bank Mandiri (Persero), Tbk periode 2015 - 2016, Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisiner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2014 - 2015, dan Presiden Direktur dan CEO di Indonesia Infrastructure Finance periode 2011 - 2013.

Beliau meraih gelar MBA dari Erasmus University, Rotterdam pada tahun 2001. Selain itu beliau juga memiliki sertifikasi program *Refreshment* untuk Sertifikasi Manajemen Risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada tahun 2017 dan sertifikasi Manajemen Risiko level 5 dari lembaga yang sama pada tahun 2015.



Batara Sianturi
Anggota

Merupakan anggota ASPI yang mewakili Perkumpulan Bank-Bank Asing Indonesia (PERBINA) periode 2019 - 2022. Beliau menjabat sebagai CEO Citibank N.A Indonesia. Dalam perjalanan karirnya di Citi, pernah menjabat sebagai CEO untuk Citi Filipina dan Citi *Regional Head* untuk Filipina dan Guam periode 2013 - 2015, sebagai CEO Citi Hungaria periode 2007 - 2013 dan *Regional Head* untuk 12 negara Eropa Timur lainnya periode 2008 - 2013.

Beliau meraih gelar Bachelors of Science dari Case Western Reserve University pada tahun 1983, gelar MSc dari Steven's Institute of Technology pada tahun 1984, serta gelar MBA dari St John's University pada tahun 1988.



Abdullah Firman Wibowo
Anggota

Diangkat sebagai anggota Badan Pengawas untuk periode 2019 - 2022. Saat ini Beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. sejak Februari 2021. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank BNI Syariah (2017-2021), *Head of Subsidiaries Company* BNI pada tahun 2016, sebagai *Senior Executive Vice President (SEVP) Business Risk* PT Bank BNI Persero Tbk. pada tahun 2015, sebagai *Head of International Division* BNI pada tahun 2011, sebagai *Head of Treasury Division* BNI pada tahun 2010, dan sebagai GM BNI Tokyo periode 2008 - 2010.

Beliau meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1988, gelar Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1989, dan mengambil program Doktor dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2007. Selain itu juga aktif menjadi narasumber *public lecturer* di berbagai Universitas serta menjadi *assessor* untuk sertifikasi Manajemen Risiko level 5.



Supriyatno
Anggota

Diangkat sebagai anggota Badan Pengawas untuk periode 2019 - 2022. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jateng. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 - 2017 dan sebagai Direktur Utama Bank BPD DIY periode 2008 - 2014.

Beliau meraih gelar Master of Business Administration dari University of Dallas, USA Jurusan International Management pada tahun 1991 dan gelar Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2000.



Sunarso
Anggota

Diangkat sebagai anggota Badan Pengawas untuk periode 2021-2024. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau biasa disebut Bank BRI. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Direktur BRI (2019), Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) (2017-2019), Wakil Direktur Utama BRI (2015-2017), Direktur *Comercial & Business Banking* Bank Mandiri (2010-2015). Beliau meraih gelar Sarjana Agronomi dari Institut Pertanian Bogor (1998), dan Magister Administrasi Bisnis, Universitas Indonesia (2002).

Selain itu, beliau juga memperoleh beberapa Pendidikan *professional*, antara lain Geopolitic Risk Related to Asia, International Risk Management Refreshment Program, National Chengchi University, Taipei Taiwan and IBI and UGM (2018); Systemic Operational, and Infrastructure Risk Management, Università Commerciale Luigi Bocconi, Italy and Erasmus University (2016); Decision Making for Leaders-Melbourne University, Australia (2014); Leadership, Strategy and Implementation-Kellogg School of Management, Northwestern University-Evanston, Illinois-USA (2013); High Performance Leadership-The IMD-Lausanne, Switzerland (2012); Strategic Business Leadership: Engagement, Performance & Execution-University of Chicago-Graduate School of Business, USA (2011); Market Driving Strategies-London Business School, UK (2019); Creative Strategic Thinking for Innovation-Australian Graduates School of Management, University of New South Wales, Sydney Australia (2008).

PROFIL BADAN PENGURUS



Santoso
Ketua Umum

Menjabat sebagai Ketua Umum untuk periode 2021 – 2024. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PT Bank Central Asia, Tbk, aktif dalam kepengurusan Badan Eksekutif AKKI, serta Ketua Bidang Penelitian, Studi & Publikasi Ikatan Bankir Indonesia (IBI).

Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai *Head of Pension Funding* BCA di Dana Pensiun BCA periode Juli 2003 – April 2016, sebagai VP *Organization Development* di Indonesia Marketing Association (IMA) periode Maret 2013 – Maret 2015, sebagai Komisaris di PT Abacus Cash Solution (Anak Perusahaan Dana Pensiun BCA) periode Oktober 2013 – Mei 2016, dan anggota Komite ADPI di Asosiasi Dana Pensiun Indonesia periode Juni 2013 – April 2016. Beliau meraih gelar Magister jurusan Teknologi Industri dari Universitas Trisakti pada tahun 1989.



YB Hariantono
Wakil Sekretaris Jenderal

Menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal untuk periode 2021 – 2024. Sebelumnya beliau menjabat sebagai ketua Komite 7 yang mengelola standar NSICCS. Beliau menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi & Operasi di PT Bank Negara Indonesia Tbk sejak Februari 2020. Dalam perjalanan karirnya beliau pernah menjabat sebagai *Head of Information Technology* PT Bank BTPN periode 2019-2020 dan juga pernah menjabat sebagai *EVP, IT Head* di BII – Maybank periode 2010-2014, dan *EVP Network Head* PT Bank Permata Tbk periode 2008-2010. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya pada tahun 1990.



Rico Usthavia Frans
Wakil Ketua Umum

Merupakan Wakil Ketua Umum untuk periode 2019 - 2022. Sejak 26 April 2021 beliau menjabat sebagai komisaris PT. Fintek Karya Nusantara (LinkAja). Dalam perjalanan karirnya di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, pernah menjabat sebagai Direktur IT periode 2018 – 2021, sebagai Direktur *Digital Banking & Technology* periode 2016 – 2018, dan sebagai *SEVP Transaction Banking* periode 2013 – 2016. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992.



Henry Iswaratioso
Bendahara

Menjabat sebagai Bendahara untuk periode 2021-2024. Sejak April 2017 hingga saat ini beliau menjabat sebagai CEO di PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) dan dari tahun 2007 hingga sekarang di PoinStar Pte Ltd sebagai *Chairman*. Pernah menjabat sebagai Director & Country Head di Alipay di Juli 2015 – Juni 2017. Di tahun 2007 – 2015 menjabat Co-Founder di INDOMOG dan menjabat sebagai CEO di Polaris 3D di Agustus 2001 – Agustus 2007. Aktif di beberapa organisasi antara lain di AFTECH dan IDEA.



Handayani
Sekretaris Jenderal

Diangkat sebagai Sekretaris Jenderal untuk periode 2021 – 2024. Beliau menjabat sebagai Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Direktur Konsumer di PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk periode April 2016 – Oktober 2017, dan sebagai Direktur Niaga PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk periode Desember 2014 – April 2016. Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjajaran pada tahun 2001.



Eddy Hadiyanto
Wakil Bendahara

Diangkat sebagai Wakil Bendahara untuk periode 2019-2022. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua Komite 4 yang menangani Kegiatan Usaha Pengiriman Uang. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI) serta Direktur PT Eka Bakti Amerta Yoga Sejahtera (Penyelenggara Transfer Dana bukan Bank).



Timothy Utama
Ketua Komite 1 (*Open Banking*)

Diangkat sebagai Ketua Komite 1 untuk periode 2019-2022. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Ketua Komite 5 yang menangani *e-Banking*. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur *Information Technology* Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak 15 Maret 2021. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Managing Director, Treasury and Trade Solutions Citibank N.A Indonesia periode 2016-2021, selain itu juga pernah menjabat sebagai Chief Operations, and Technology Officer di Singapore Exchange/SGX periode 2012 – 2016, sebagai *Managing* Direktur Teknologi dan Operasional Bank Permata, Head of Wholesale Banking Operations Global Shared Service Centre Standard Chartered Bank India, Global Head of Trade Services ANZ Australia dan Head of Global Clients Standard Chartered Bank Singapore. Beliau meraih gelar Bachelor of Business Administration jurusan Akuntansi & Keuangan dari Texas A&M University.



Soejanto Soetjijo
Ketua Komite 4 (*Data dan Keamanan*)

Diangkat sebagai Ketua Komite 4 untuk periode 2019-2022. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Bendahara ASPI. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur di PT Bank Sinarmas. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Capital Indonesia pada tahun 2013, sebagai *Advisor* Bank Capital Indonesia pada tahun 2012, dan sebagai Direktur di MNC Finance periode 2004 – 2012.



Abraham Jozef Adriaansz
Ketua Komite 2 (*Sistem Pembayaran Ritel*)

Merupakan Ketua Komite 2 untuk periode 2019-2022. Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur *Corporate Strategy & Development* PT Rintis Sejahtera serta aktif sebagai Ketua *Asian Payment Network* (APN) periode 2017 – 2019. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Head of Finance Services di PricewaterhouseCoopers Consulting periode 1993 – 2002. Beliau meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung dan gelar MBA dari Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma, USA.



Ardhi Wibowo
Ketua Komite 5 (*Regulasi/Kebijakan/Prosedur*)

Menjabat sebagai Ketua Komite 5 bidang Regulasi/Kebijakan/Prosedur untuk periode 2020-2023. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 19 tahun di industri perbankan dan lembaga keuangan dan saat ini bergabung dengan PT Bank UOB Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Kepatuhan di Citibank Indonesia. Beliau memulai karirnya sebagai *Senior Team Leader Sales and Marketing Department* untuk GE Capital Indonesia, dan selanjutnya meniti karier sebagai Associate Manager di Ernst & Young Indonesia, Manajer Audit Internal di The Royal Bank of Scotland dan Barclays Indonesia, Kepala Audit *Wholesale, Auto* dan Anak Perusahaan di Bank CIMB Niaga, dan selanjutnya bergabung di Citibank Indonesia. Beliau meraih gelar Master of Business Administration dari University of Birmingham, Inggris dan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia.



Ari Yanuanto Asah
Ketua Komite 3 (*Infrastruktur & Sistem Pembayaran*)

Merupakan Ketua Komite 3 untuk periode 2019 – 2022. Keterlibatan beliau di ASPI mulai dari tahun 2012 sebagai anggota kemudian menjadi Ketua Komite 1 yang menangani RTGS, SKN, Transfer Valas, BI S4. Beliau menjabat sebagai Direktur *Operation & IT* di PT Allo Bank Indonesia Tbk sejak tahun 2021 hingga saat ini. Dalam perjalanan karirnya beliau pernah menjabat sebagai *Head Of Projects & System Development (Ops)* di PT Bank Permata Tbk pada tahun 2003-2011 dan sebelum menjabat sebagai Direktur *Operation & IT* di PT Allo Bank Indonesia (d/h PT Bank Harda Internasional Tbk), beliau pernah bergabung di Bank Mega Tbk sebagai *Credit, Trade & Treasury Process Development Head*, dengan berbagai penugasan dan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi *Transformation Project*.

PROFIL DIREKTUR EKSEKUTIF



Djamin Edison Nainggolan
Direktur Eksekutif

Diangkat sebagai Direktur Eksekutif ASPI dengan tanggung jawab mengkoordinasikan berbagai kegiatan ASPI. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *SEVP Digital Banking* dan *Consumer Lending Bank* Danamon sejak tahun 2010 dan memulai kariernya di *Consumer Banking* Citibank sejak tahun 1990. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Padjajaran, Bandung dan memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada tahun 1986 serta memperoleh gelar MBA dari Universitas Arkansas, Amerika Serikat pada tahun 1994.



Susiana Suhendra
Direktur Eksekutif

Menjabat sebagai Direktur Eksekutif ASPI untuk menangani kegiatan Operasional dan kegiatan yang berhubungan dengan Infrastruktur Sistem Pembayaran. Mempunyai pengalaman yang ekstensif di perbankan. Dalam perjalanan karirnya di HSBC, beliau pernah menjabat sebagai *Senior Vice President & Head of Securities Services*, sebelumnya beliau juga pernah mengepalai divisi *Financial Institution Group*, serta pernah menjabat sebagai komisaris di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.



Yanti Pusparini
Direktur Eksekutif

Menjabat sebagai Direktur Eksekutif ASPI untuk menangani data, pengaturan, perizinan dan perencanaan serta *member engagement*. Sebelum bergabung di ASPI, beliau berkarir di Bank of America NA. Indonesia sebagai *Head of Fulfilment, Service dan Operations*. Beliau juga pernah bergabung di PT. Bank Negara Indonesia sebagai *Project Manager* untuk *Integrated Data Management, Group Head* di Divisi *Transactional Banking* dan di Divisi Perencanaan Strategis serta Divisi Teknologi Informasi. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Sipil dan Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada, serta doktoral di bidang Strategic Management dari Universitas Trisakti.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

2

PERKEMBANGAN ASOSIASI

PERKEMBANGAN KEANGGOTAAN

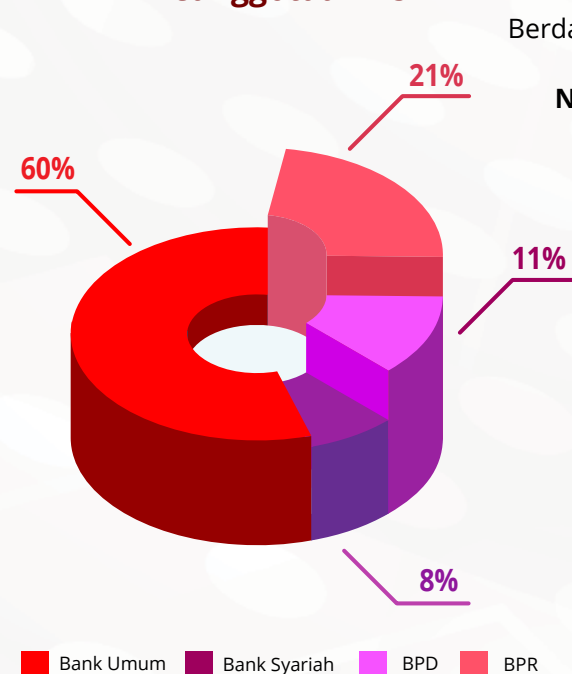
Di tahun 2021, terdapat 30 anggota baru yang terdiri dari 23 perusahaan *fintech*, 5 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 2 Lembaga Selain Bank. Dalam tahun pelaporan terdapat 2 anggota yang mengundurkan diri dikarenakan oleh penghentian aktivitas dalam sistem pembayaran dan terjadinya *merger* 3 bank syariah menjadi satu, sehingga pada akhir tahun 2021 jumlah anggota ASPI menjadi 187 anggota.

Dari total 187 anggota ASPI, 117 diantaranya berasal dari perbankan dan 70 dari Lembaga Selain Bank (*fintech*, Lembaga *Switching*, Prinsipal, Telco dan sebagainya). Sedangkan dari jenis keanggotaan, tercatat 122 Anggota Biasa dan 65 lainnya merupakan Anggota Afiliasi.

Jumlah Anggota ASPI

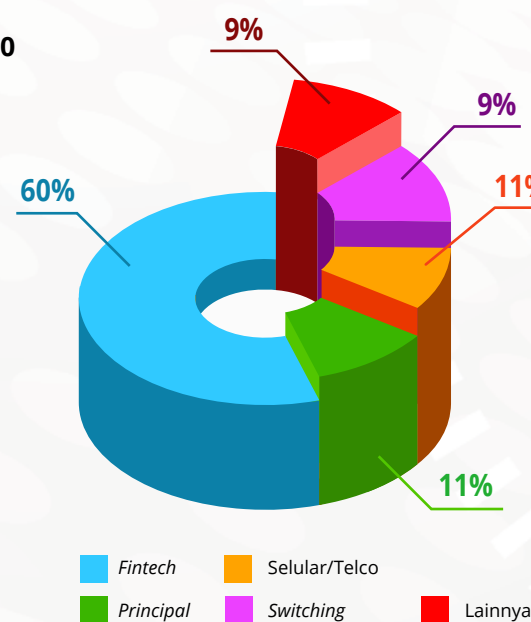


Komposisi Bank dalam Keanggotaan ASPI



Berdasarkan Kategori:
Bank : 117
Non bank : 70

Komposisi Non-Bank dalam Keanggotaan ASPI



RAPAT UMUM ANGGOTA ASPI

Pada tanggal 23 Juni 2021 telah diselenggarakan secara virtual Rapat Umum Anggota ASPI tahun 2021 yang dihadiri oleh 124 anggota atau 72,94% dari seluruh anggota ASPI yang berjumlah 70 (saat RUA Tahunan dilaksanakan), dengan agenda rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan dan Pengesahan Laporan keuangan ASPI untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020;
2. Perubahan Anggaran Dasar ASPI; dan
3. Perubahan Susunan Badan Pengurus dan Badan Pengawas ASPI.

Berdasarkan Rapat Umum Anggota (RUA) ASPI yang diadakan pada tanggal 23 Juni 2021, susunan kepengurusan ASPI adalah sebagai berikut:

Badan Pengawas

Ketua	Kartika Wirjoatmodjo
Anggota	Batara Sianturi
Anggota	Abdullah Firman Wibowo
Anggota	Supriyatno
Anggota	Sunarso

Badan Pengurus

Ketua Umum	Santoso
Wakil Ketua Umum	Rico Usthavia Frans
Sekretaris Jenderal	Handayani
Wakil Sekretaris Jenderal	YB Hariantono
Bendahara	Henry Iswaratioso
Wakil Bendahara	Eddy Hadiyanto
Ketua Komite 1	Timothy Utama
Ketua Komite 2	Abraham Jozef Adriaansz
Ketua Komite 3	Ari Yanuanto Asah
Ketua Komite 4	Soejanto Soetjijo
Ketua Komite 5	Ardhi Wibowo

3

KINERJA & KEGIATAN ASPI 2021



Sebagai *Self-Regulatory Organization* (SRO) dalam industri sistem pembayaran Indonesia, ASPI memiliki peran, tugas, dan fungsi dalam membangun ekosistem pembayaran yang terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, ASPI memiliki serangkaian program kegiatan yang telah dilaksanakan di sepanjang tahun 2021, antara lain meliputi :

PENGEMBANGAN PRODUK

1. Pengembangan Fitur QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

ASPI bersama pelaku industri dengan dukungan Bank Indonesia telah berhasil menyusun standar nasional berteknologi QR Code untuk memenuhi kebutuhan pasar akan sistem pembayaran yang lebih efektif dan efisien.

Di tahun 2021, bersama dengan industri sistem pembayaran, ASPI telah melakukan pengembangan QRIS lebih jauh untuk meningkatkan interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran. Beberapa pengembangan standar QRIS yang telah dilakukan diantaranya pada QRIS *Consumer Presented Mode* (CPM), dan pengembangan pada QRIS *Merchant Presented Mode* (MPM) yaitu menambahkan beberapa fitur untuk mengakomodir transaksi QRIS *Crossborder* (antar-negara), serta QRIS Transfer Tarik Tunai dan Setor (TTS).

Di tahun pelaporan, ASPI telah menyelesaikan penyusunan standar CPM yang merupakan metode lainnya dari QRIS dengan memberikan verifikasi dan rekomendasi atas pengajuan dari Pelaku Jasa Pembayaran (PJP) untuk implementasi QRIS CPM agar berjalan dengan baik. QRIS CPM telah berhasil dikembangkan dan diimplemen-

tasikan di tahun 2021 dengan berlakunya keputusan dari Bank Indonesia yaitu berupa Surat Bank Indonesia Nomor 23/416/DKSP/Srt/B perihal Penyiapan SK Gubernur Bank Indonesia QRIS CPM.

Sementara itu untuk memajukan industri pariwisata, dalam mengembangkan QRIS antar-negara, ASPI bekerjasama dengan Bank Indonesia dan pelaku sistem pembayaran, berkolaborasi dengan negara lainnya seperti Thailand dan Malaysia. Kerja sama ini diharapkan dapat mempermudah wisatawan manca negara ke Indonesia dan sebaliknya dalam melakukan transaksi pembayaran. Bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 2021, Bank Indonesia meluncurkan *pilot project* QRIS *Crossborder* yang diharapkan dapat menjadi alternatif pembayaran ritel yang lebih aman, efisien, dan hemat biaya bagi wisatawan, termasuk membantu *e-commerce* dan mendorong usaha di bidang pariwisata. Di samping itu transaksi QRIS *Crossborder* dapat berkontribusi pada kemakmuran dan digitalisasi ekonomi regional.

Di tahun 2021 ASPI dengan dukungan Bank Indonesia, bersama perwakilan anggotanya yang terdiri dari 22 PJP serta 4 lembaga *switching* yang merupakan pelaku industri sistem pembayaran, telah mengembangkan fitur TTS pada standar pembayaran yang menggunakan metode QR Code yang diharapkan dapat memudahkan pengguna melakukan transaksi Transfer, Tarik Tunai, dan Setor cukup dengan memindai kode QRIS melalui *gadget* masing-masing. Fitur TTS ini telah diperkenalkan ke publik dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di

awal April 2021. QRIS TTS akan diterapkan kepada para agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif).

2. Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP)

Di tahun 2021, ASPI bersama dengan 16 perwakilan industri dan dukungan Bank Indonesia telah menyusun Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP) guna menciptakan industri sistem pembayaran yang setara antara bank dan *fintech*, seraya mendorong inovasi dan kompetisi, interoperabilitas, lebih efisien, serta meningkatkan keandalan infrastruktur sistem pembayaran. Hal ini dilaksanakan dengan menyusun 3 standar/pedoman, yaitu Standar Teknis dan Keamanan, Standar Data dan Spesifikasi Teknis, serta Pedoman Tata Kelola, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari pelaku industri yang berpartisipasi dalam *Working Group* Nasional *Open API* Pembayaran yang dibentuk oleh ASPI bersama dengan Bank Indonesia. SNAP diharapkan dapat diimplementasikan tahun 2022.

Sebelum diluncurkannya SNAP, sistem *Open API* atau *platform* perbankan/Lembaga Keuangan yang dapat diakses oleh *fintech* masih terfragmentasi karena belum ada standarisasi. Tujuan utama dari Standarisasi *Open API* adalah mendukung percepatan ekonomi keuangan digital melalui *interlink* antara bank dengan *fintech* untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran yang selaras dengan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

Bank Indonesia telah menetapkan SNAP melalui "Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/10/KEP.GBI/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan *Standard Open Application Programming Interface* (API) Pembayaran" yang wajib diterapkan secara bertahap bagi Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP).

PENYUSUNAN DAN PENERBITAN KETENTUAN ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA (KASPI) DAN BULETIN ASPI (BASPI)

Sesuai dengan perannya sebagai SRO, di tahun pelaporan ASPI mengeluarkan beberapa ketentuan dan buletin bagi anggotanya mengenai hal-hal teknis dan mikro, hal-hal yang belum diatur dan/atau yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Ketentuan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran.

Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (KASPI)

Di tahun 2021, ASPI telah menerbitkan KASPI tentang Kerjasama Bank Sponsor dan Peserta Tidak Langsung (PTL) dalam Menggunakan BI FAST dan KASPI tentang Penanganan Permasalahan Transaksi Transfer Dana Melalui BI-FAST.

a. KASPI tentang Kerjasama Bank Sponsor dan Peserta Tidak Langsung dalam Menggunakan BI-FAST (KASPI No. ASPI/K-II/4/XII/2021)

KASPI yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2021 ini bertujuan untuk menyediakan standar minimum yang harus dimuat dalam perjanjian Kerjasama antara Bank Sponsor dan Peserta Tidak Langsung (PTL) sehubungan dengan penggunaan BI-FAST. KASPI ini juga menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban Bank Sponsor dan PTL, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai pengelolaan likuiditas dan klausula mengenai penyelesaian perselisihan.

b. KASPI tentang Penanganan Permasalahan Transaksi Transfer Dana Melalui BI-FAST (KASPI No. ASPI/K-II/5/XII/2021)

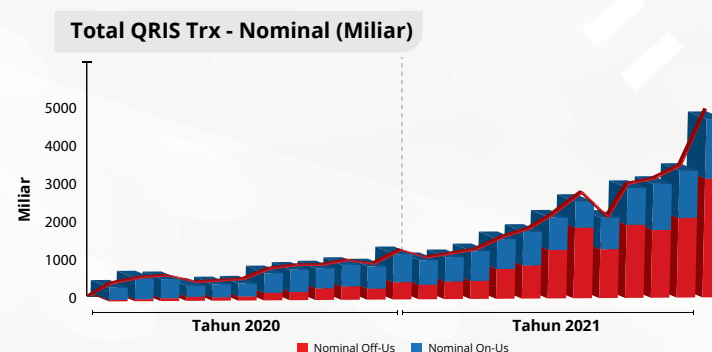
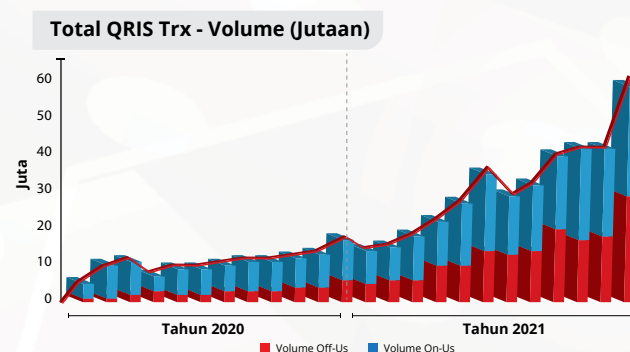
KASPI ini juga ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2021 yang bertujuan digunakan sebagai pedoman untuk melengkapi Peraturan Bank Indonesia mengenai penanganan penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan transfer dana melalui BI-FAST.

Buletin ASPI (BASPI)

Dalam tahun pelaporan ASPI mengeluarkan 2 BASPI untuk melengkapi dan/atau melakukan penyesuaian terhadap standar yang telah diterbitkan sebelumnya.

a. BASPI Nomor: 3/III/2021 perihal Tampilan QRIS MPM yang dapat dijadikan acuan teknis untuk menyeragamkan Tampilan QRIS MPM secara konsisten agar lebih mudah dikenali dan diterima secara luas oleh konsumen sehingga slogan "SATU QRIS UNTUK SEMUA" dapat tersampaikan dan tersosialisasikan dengan baik.

b. BASPI Nomor: 4/CERT/VII/2021 tentang NSICCS CA *Public Keys* yang menjelaskan mulai berlakunya CA Key NSICCS 1984-bits. Mulai Januari 2022, penerbit kartu NSICCS dapat menggunakan CA Key 1984-bits untuk menerbitkan kartu NSICCS dengan masa berlaku sampai 31 Desember 2030.



Sumber Grafik: www.aspi-indonesia.or.id

FUNGSI PENGELOLAAN SERTIFIKASI & REKOMENDASI

Di tahun 2021 ASPI telah melakukan beberapa sertifikasi dan sertifikasi ulang kartu beserta perangkatnya, antara lain sertifikasi 13 produk kartu ATM/Debit, 10 produk EDC (*Electronic Data Capture*), 4 produk ATM, 1 sertifikasi ulang kartu ATM/Debit, 1 sertifikasi ulang mesin ATM, dan 44 sertifikasi CPT (*Card Perso Test*).

Hal tersebut merupakan bagian dari tugas ASPI sebagai Lembaga Standar dalam melakukan sertifikasi termasuk sertifikasi ulang pada kartu dan terminal untuk dipergunakan di Indonesia. Setiap proses sertifikasi dan sertifikasi ulang harus melalui uji coba guna memastikan kartu dan terminal tersebut sudah memenuhi persyaratan standar beserta keamanannya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Standar, selain memberikan sertifikasi, pada tahun pelaporan ASPI juga telah memberikan Spesifikasi QRIS dan Surat Rekomendasi QRIS kepada PJP anggota ASPI.

Selama tahun 2021 ASPI telah memberikan spesifikasi QRIS kepada 26 PJP dan berdasarkan pengujian yang dilakukan PJP serta laporan hasil *User Acceptance Test* (UAT) dengan Lembaga *Switching*, 34 surat rekomendasi QRIS MPM telah diterbitkan. Untuk QRIS CPM, ASPI telah memberikan 24 spesifikasi QRIS dan 1 PJP mendapatkan rekomendasi QRIS CPM dari ASPI.

PENGELOLAAN STANDAR NSICCS

ASPI mendorong anggotanya untuk menerapkan standar nasional berteknologi *chip* NSICCS sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia no 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 terkait implementasi NSICCS dan penggunaan PIN 6-digit untuk kartu ATM dan/atau Kartu Debit yang menggunakan teknologi *chip*, di mana penerapannya dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017, dan sepenuhnya telah diimplementasikan per 31 Desember 2021. Untuk mendukung implementasi teknologi *chip* NSICCS pada kartu dan terminal, ASPI memonitor pencapaian anggotanya dengan mengingatkan anggotanya yang pencapaiannya di bawah target yang ditentukan. Dari hasil laporan yang



diterima oleh ASPI, per 31 Desember 2021 hanya satu bank yang belum sepenuhnya menerapkan NSICCS pada terminalnya, dan diharapkan target 100% akan dicapai pada kuartal 1 tahun 2022.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Lembaga Standar yang mengelola dan melaksanakan fungsi *Key Management/Certificate Authority* (CA) untuk Standar Nasional Teknologi *Chip* NSICCS, ASPI telah menerbitkan NSICCS CA *Public Key* 1984-bit dengan masa berlaku hingga akhir Desember 2030, sebagaimana diatur dalam BASPI Nomor: 4/CERT/VII/2021 tentang NSICCS CA *Public Keys*.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan memberikan pilihan bagi penerbitan kartu dengan periode yang lebih panjang.

MEMBER ENGAGEMENT AND COMMUNICATION PROGRAM

Dalam rangka memberikan informasi dan menjalin komunikasi dengan anggota, ASPI telah menyelenggarakan kegiatan *Member Forum* dan sosialisai edukasi, serta menerbitkan *newsletter* sebagai sarana komunikasi dan informasi.

Member Forum

Di tahun 2021, *Member Forum* dilaksanakan secara virtual, mengangkat topik-topik yang relevan dengan industri sistem pembayaran dan menghadirkan pembicara yang kompeten dibidangnya.

Pada awal tahun ASPI menyelenggarakan *Member Forum* pada tanggal 24 dan 25 Maret 2021 dengan tema “*QRIS in 2021 Expanding the Opportunities, Let's Collaborate*”. Dalam kesempatan ini narasumber dari Bank Indonesia membahas strategi pengembangan QRIS untuk mencapai target 12 juta *merchant* QRIS.

Selanjutnya, ASPI menyelenggarakan *Member Forum* kedua pada tanggal 3 November 2021 dengan tema “*Membangun Kolaborasi Pelaku Industri Sistem Pembayaran dalam Menangani Tindak Kejahatan Pembayaran Digital*”. Dalam webinar ini ASPI menghadirkan tiga narasumber yang kompeten dibidangnya antara lain dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Praktisi *Cyber Security* dan Konsultan *Cyber Security* Indonesia.

Sosialisasi dan Edukasi Anggota

Untuk mendorong penggunaan QRIS MPM, ASPI telah melakukan edukasi dan memberikan bantuan yang diperlukan kepada calon PJP QRIS untuk dapat mengimplementasikan QRIS MPM sebagai layanan kepada konsumen dan *merchant*.

ASPI juga menyelenggarakan sosialisasi mengenai penerapan NSICCS *Certificate Authority Public Key* 1984-bit melalui webinar kepada PJP *Payment Initiation Acquiring Services* (PJP PIAS), PJP *Account Issuance Services* (PJP AIS) dan Lembaga *Switching*.

Selain melakukan sosialisasi untuk ketentuan/pedoman baru, ASPI aktif berpartisipasi dalam acara Bank Indonesia untuk mensosialisasikan kembali Peraturan Bank Indonesia dan Ketentuan ASPI yang telah diterbitkan antara lain KASPI SKN BI dan Warkat Debit.

Newsletter

Secara berkala ASPI mengeluarkan *newsletter* guna memberikan *update* dan informasi kepada anggota diantaranya:

- Pada Triwulan 1, ASPI memberikan *update* kepada anggotanya antara lain mengenai implementasi dan pengembangan QRIS, *Certificate Authority*, *Open API* dan rencana pengembangan *contactless payment*.

- Pada Triwulan 2, ASPI menampilkan Berita Statistik Sistem Pembayaran di Indonesia, termasuk diantaranya statistik penggunaan QRIS, Kartu Debit, Uang Elektronik, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dan pencapaian implementasi standar NSICCS.
- Pada Triwulan 3, ASPI mengangkat tema buletin: “Sinergi dan Kolaborasi Sistem Pembayaran untuk Negeri” dengan membagikan informasi terkini mengenai Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP), QRIS antarnegara, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI PJP) dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PBI PIP) dan hasil Rapat Umum Anggota ASPI 2021.
- Memasuki kuartal terakhir 2021, pada triwulan 4, ASPI mengangkat tema buletin “Bertumbuh Memperkuat Sistem Pembayaran Indonesia” dengan menampilkan informasi terkini mengenai persiapan implementasi SNAP, Pengembangan QRIS *Crossborder*, membagikan informasi terkini tentang pencapaian QRIS 12 Juta *Merchant* dan QRIS TTS (Transfer, Tarik Tunai, dan Setor).

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR SISTEM TEKNOLOGI INTERNAL ASPI

Di tahun pelaporan ASPI juga telah melakukan peningkatan dan penyesuaian *hardware/software* yang memadai untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang diperlukan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi melalui otomasi, menyediakan *File Server* baru, dan penempatan *Server* ASPI di lokasi yang terpisah (*Data Center*) sehingga keamanan data internal ASPI dapat lebih terjaga.

PENGKINIAN WEBSITE ASPI

ASPI telah melakukan pengkinian dan pengembangan *website* guna memudahkan anggota dan pelaku usaha sistem pembayaran lainnya untuk mendapat informasi mengenai perkembangan dan berita sehubungan dengan standar dan layanan, serta aktivitas ASPI. Selain itu, pengembangan *website* ASPI ini diharapkan dapat memudahkan anggota maupun calon anggota untuk melakukan registrasi atau pendaftaran secara elektronik terkait keanggotaan baru dan pemrosesan permohonan untuk sertifikasi dan surat rekomendasi dari ASPI.

4

RENCANA KEGIATAN ASPI 2022



Dalam rangka mendukung implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) dan menjalankan Inisiatif Strategis ASPI dibidang Sistem Pembayaran, ASPI akan berkolaborasi secara intensif dengan anggota dan *stakeholders* terkait untuk mewujudkan sistem pembayaran di Indonesia yang cepat, mudah, murah, aman, andal dan efisien melalui kegiatan berikut:

MENDUKUNG IMPLEMENTASI *BLUEPRINT* SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA 2025

Sejalan dengan program strategis Bank Indonesia yang tertuang pada BSPI 2025, ASPI menjalankan beberapa inisiatif untuk mendorong modernisasi infrastuktur sistem pembayaran dan membangun keterkaitan antara Bank dan Lembaga Selain Bank (LSB) dalam melanjutkan inisiatif satu (*open banking*) dan menjalankan inisiatif kedua (sistem pembayaran ritel).

SNAP

Melanjutkan keberhasilan *first mover* SNAP, ASPI terus melakukan evaluasi dan mempersiapkan pelaksanaan *second mover* yang diharapkan selesai di akhir 2022. Disamping itu, ASPI tetap akan melakukan pendampingan dan edukasi kepada para PJP yang akan melakukan implementasi *Open API*.

Sistem Pembayaran Ritel

- BI-FAST
ASPI mendukung pelaksanaan BI-FAST berikut pengembangannya dengan menerbitkan ketentuan yang bersifat teknis dan mikro bagi anggota ASPI. ASPI juga mendorong partisipasi anggota untuk memberikan masukan secara aktif melalui ASPI sebagai representasi industri atas usulan pengembangan dan penambahan fitur-fitur BI-FAST kepada regulator, agar layanan BI-FAST yang disediakan (24/7) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri.
- QRIS
Dalam rangka menyediakan kebutuhan masyarakat saat melakukan transaksi transfer, tarik tunai dan setor melalui QRIS, maka disediakan penambahan fitur Transfer, Tarik Tunai, dan Setor (TTS). Fitur ini diharapkan sudah dapat diimplementasikan pada tahun 2022.

Selain itu, untuk meningkatkan sektor pariwisata baik di Indonesia maupun di manca negara, ASPI juga berencana melakukan kerja sama dengan Malaysia, Singapura, Korea Selatan dan Republik Rakyat Tiongkok sebagai upaya mempermudah wisatawan dalam bertransaksi melalui perluasan QRIS *Crossborder* (antarnegara).

MENDUKUNG IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS DI SISTEM PEMBAYARAN

Contactless Dual Interface Payment Card

Untuk memenuhi kebutuhan industri yang lebih efisien, serta memberikan pilihan kepada masyarakat akan tersedianya instrumen pembayaran yang lebih beragam, dan membawa industri pembayaran di Indonesia setara dengan industri pembayaran di negaralainnya, maka ASPI berinisiatif mengembangkan standar pembayaran berbasis teknologi nirsentuh (*contactless*) dengan melakukan kajian dan usulan kepada Bank Indonesia di tahun 2022. Percepatan inisiatif pengembangan *contactless* berdasarkan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, dimana masyarakat diharapkan dapat mengurangi kontak fisik selama bertransaksi.

Pengembangan Elektronifikasi Pembayaran

Pengembangan *Direct Debit* dan transaksi online untuk mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran transportasi yang meliputi *Multi Lane Free Flow* (MLFF) dan Aplikasi JakLingko.

Pada MLFF, ASPI bersama dengan Bank Indonesia, pelaku industri sistem pembayaran, Badan Usaha Jalan Tol, dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia akan membantu penerapan dan pengoperasian *Multi Lane Free Flow* (MLFF) yang merupakan sistem pembayaran tanpa berhenti di gerbang tol.

Sedangkan untuk Aplikasi JakLingko, bersama dengan Bank Indonesia, tim JakLingko dan mitra strategis lainnya, ASPI akan melakukan pembahasan dan uji coba aplikasi JakLingko yang merupakan sistem transportasi terintegrasi, baik rute, manajemen, maupun pembayarannya. Hal ini akan memudahkan pengguna melakukan perjalanan antarmoda transportasi di Jabodetabek.

Proses Pendukung Operasional

ASPI akan melakukan persiapan dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia sehubungan dengan penerbitan PBI no 23/6/2021 tentang PJP, dimana PJP wajib melaksanakan audit sistem informasi dan pengujian keamanan (*penetration test*) secara menyeluruh oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO paling sedikit 1 tahun 1 kali. ASPI sebagai SRO ditugaskan untuk menatausahakan daftar auditor teknologi informasi yang memenuhi standar kualifikasi untuk melakukan audit sistem informasi dan pengujian keamanan terhadap sistem dan operasional PJP dan PIP.

MEMBER ENGAGEMENT AND COMMUNICATION PROGRAM

Dalam rangka memberikan nilai tambah dan meningkatkan hubungan antara ASPI dengan anggotanya, serta meningkatkan hubungan antar anggota ASPI maka ASPI akan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti webinar, *executive gathering*, sosialisasi dan edukasi, serta mendukung penyelenggaraan G20 Indonesia 2022 bersama dengan PERBANAS, AFTECH dan KADIN.

Di tahun mendatang, ASPI berencana menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada anggota, salah satunya mengenai ketentuan penyusunan materi edukasi untuk *merchant* dan pengguna QRIS untuk digunakan oleh PJP. Melalui sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh ASPI diharapkan adanya peningkatan pengguna baru dan *merchant* QRIS sesuai yang di targetkan Bank Indonesia.

ASPI terus berupaya meningkatkan partisipasi dan kemampuan anggotanya serta aktif dalam berbagai forum diskusi sistem pembayaran sebagai nara-sumber guna meningkatkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, aman dan andal bagi kepentingan masyarakat.



Indonesia G20 Presidency
**Recover Together
Recover Stronger**

KASPI

Bersama dengan pelaku sistem pembayaran, ASPI akan menyusun KASPI tentang pencegahan, penanganan dan penyelesaian transaksi *fraud*. Ketentuan ini diharapkan dapat mencegah, menangani dan menyelesaikan transaksi yang diduga sebagai tindak kejahatan sehingga dapat ditangani lebih cepat dan efisien serta dapat membantu pelaku sistem pembayaran untuk memitigasi risiko yang diakibatkan oleh tindak kejahatan.

Selain itu, ASPI juga akan menyelesaikan ketentuan ASPI tentang penyusunan materi edukasi untuk *merchant* dan pengguna QRIS yang dibuat sebagai acuan bagi anggota ASPI dalam melakukan edukasi kepada *merchant* dan pengguna. Hal ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang benar dan sama dalam mengedukasi *merchant* dan pengguna sehingga mereka memperoleh informasi yang lengkap dan akurat.

ASPI juga menyusun Rancangan KASPI Pengalihan Tanggung Jawab (*Liability Shift*) Kartu ATM dan/atau Kartu Debit, untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan kartu ATM dan/atau kartu Debit pada terminal ATM/EDC. Rancangan KASPI *Liability Shift* yang disesuaikan dengan peraturan baru Bank Indonesia telah disampaikan kembali kepada Bank Indonesia pada triwulan 4 2021 dan akan diterapkan di tahun 2022.

PENGEMBANGAN INTERNAL ASPI

Untuk meningkatkan kemampuan ASPI agar dapat menjadi mitra Bank Indonesia yang saat ini sedang melakukan reformasi sistem pembayaran, ASPI terus berupaya meningkatkan prasarana dan sarana untuk mendukung tugas ASPI sebagai Lembaga Standar dan SRO. Di samping itu ASPI akan terus melakukan peningkatan sumber daya manusia agar memenuhi kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatannya.

5

LAPORAN KEUANGAN

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL

31 DESEMBER 2021

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Pengurus	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan – Pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut	
Neraca	1
Laporan Perubahan Aset Bersih	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan atas Laporan Keuangan	4 – 12



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama | : Santoso Liem |
| Alamat kantor | : Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
Graha Mandiri Lt 18
Jl. Imam Bonjol No 61 |
| Alamat domisili sesuai KTP | : Kepa Duri Blok D 1/90 RT02/RW12
Duri Kepa, Kebon Jeruk. Jakarta Barat |
| Nomor telepon | : (62-21) 230 1947 |
| Jabatan | : Ketua Umum |
| 2. Nama | : Henry Iswaratioso |
| Alamat kantor | : Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
Graha Mandiri Lt 18
Jl. Imam Bonjol No 61 |
| Alamat domisili sesuai KTP | : Jl Pluit Samudra V/44
RT07/RW05
Pluit, Penjaringan
Jakarta Utara |
| Nomor telepon | : (62-21) 230 1947 |
| Jabatan | : Bendahara |

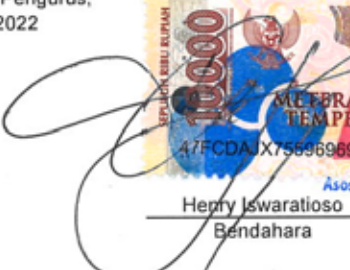
Menyatakan bahwa:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.
- Laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).
- Semua informasi dalam laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - Laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Pengurus,
Jakarta, 31 Maret 2022


Santoso Liem
Ketua Umum


Henry Iswaratioso
Bendahara



Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan
Registered Public Accountants

Menara Kadin Indonesia 9th Floor

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 kav.2-3
Jakarta 12950 - Indonesia
Phone : (62-21) 5274426 (Hunting)
Fax : (62-21) 5274435, 8305901
E-mail : info@inpact.id
Website : inpact.id



Laporan Auditor Independen

No. 00026/2.1235/AU.2/11/1018-9/1/III/2022

Pengurus
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2021, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjas lainnya.

Tanggung jawab pengurus atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standard Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup kuat dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan
Registered Public Accountants

Member Firm of INPACT

Opini Audit

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

TASNIM, FARDIMAN, SAPUAN, NUZULIANA, RAMDAN & REKAN
No. Izin Kantor No. 642/KM.1/2018



Yana Nuzuliana, CA, CPA
Surat Izin Praktik Akuntan Publik No. AP. 1018

31 Maret 2022



ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
NERACA
31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3	32.875.982.779	24.088.750.220
Piutang lain lain		10.531.050	-
Pajak dibayar dimuka	8a	-	5.376.709
Jumlah Aset Lancar		32.886.513.829	24.531.202.929
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - bersih	4	1.423.918.595	1.279.601.234
Aset tak berwujud	5	1.617.851.958	2.123.821.833
Jaminan	6	437.076.000	437.076.000
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.478.846.553	3.840.499.067
JUMLAH ASET		36.365.360.382	27.934.625.997
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Biaya yang masih harus dibayar	7	1.443.774.832	1.012.353.641
Hutang pajak	8b	2.738.569.815	2.345.808.051
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.182.344.647	3.358.161.692
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Liabilitas imbalan pasca-kerja	10	4.941.044.650	4.511.123.219
JUMLAH KEWAJIBAN		9.123.389.297	7.869.284.911
ASET BERSIH		27.241.971.084	20.065.341.085
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH		36.365.360.382	27.934.625.997

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
PENDAPATAN	11	25.531.881.077	20.450.900.319
BEBAN USAHA			
Beban proyek	12	(381.259.000)	(166.314.136)
Beban pemasaran dan penjualan		(346.489.205)	-
Beban umum dan administrasi	13	(16.553.927.389)	(15.323.210.988)
Jumlah Beban Usaha		(17.281.675.594)	(15.489.525.124)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan bunga		756.643.688	571.266.261
Beban lain-lain		(10.698.698)	(116.451.749)
Penghasilan lain-lain - bersih		745.944.990	454.814.512
KENAIKAN ASET BERSIH		8.996.150.473	5.416.189.707
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	8c	(1.819.520.474)	(1.907.512.958)
KENAIKAN ASET BERSIH SETELAH PAJAK		7.176.629.999	3.508.676.749
ASET BERSIH AWAL PERIODE		20.065.341.086	16.556.664.337
ASET BERSIH AKHIR PERIODE		27.241.971.084	20.065.341.085

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Kenaikan (penurunan) aset bersih sebelum pajak	7.176.629.999	3.508.676.749
Penyesuaian untuk:		
Penyusutan	442.003.981	274.384.777
Amortisasi	505.969.875	200.323.001
Imbalan pasca-kerja	743.390.781	4.511.123.219
Pembayaran imbalan pasca-kerja	(313.469.350)	-
Perubahan aset bersih:		
Piutang usaha	-	221.000.000
Piutang lain lain	(10.531.050)	555.577
Pajak dibayar dimuka	5.376.709	416.259.870
Jaminan	-	(6.270.000)
Hutang pajak	392.761.764	(187.418.660)
Beban yang masih harus dibayar	431.421.191	(327.607.090)
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	<u>9.373.553.900</u>	<u>8.611.027.443</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(586.321.341)	(609.310.378)
Pembelian aset tak berwujud	-	(1.517.680.000)
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	<u>(586.321.341)</u>	<u>(2.126.990.378)</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	8.787.232.559	6.484.037.065
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	<u>24.088.750.220</u>	<u>17.604.713.155</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	<u><u>32.875.982.779</u></u>	<u><u>24.088.750.220</u></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM ASOSIASI

a. Pendirian Asosiasi

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ("Asosiasi") disingkat ASPI dalam bahasa Inggris disebut *The Indonesia Payment System Association* di singkat IPSA didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris DR. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM No. 10 tanggal 20 Oktober 2010 di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh seluruh anggota ASPI dalam Rapat Umum Anggota (RUA) tanggal 28 Oktober 2011, untuk didaftarkan sebagai perkumpulan yang berbadan hukum ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan akta yang telah disusun kembali oleh Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Jakarta selaku protokol dari DR. Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM., di bawah akta No. 21 tanggal 16 Desember 2011. Akta pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-227.A.H.01.06. Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011. Anggaran Dasar mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn No. 11 tanggal 7 Agustus 2015 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0000222.AH.01.08.Tahun 2016.

Asosiasi ini memiliki peran, tugas dan fungsi membuat ketentuan dalam industri sistem pembayaran yang mampu mewadahi berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi dalam industri sistem pembayaran dengan tetap memperhatikan peraturan dan kebijakan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran.

Asosiasi berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Graha Mandiri Lantai 18 Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310.

b. Ruang Lingkup Asosiasi

Ruang lingkup dan kegiatan Asosiasi adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan peran pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam mewujudkan industri sistem pembayaran yang lebih efisien dan menyusun ketentuan yang bersifat mikro dan teknis dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
- Wadah bagi kepentingan segenap pelaku sistem pembayaran di Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, baik yang terkait dengan hubungan antar anggota ASPI maupun hubungan ASPI dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya.
- Mitra Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran guna mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal.

c. Keanggotaan Asosiasi

ASPI beranggotakan bank dan lembaga selain bank pelaku sistem pembayaran yang berbentuk badan hukum dan telah mendapat ijin dari Bank Indonesia atau instansi yang berwenang.

Pada tahun 2021 dan 2020, Asosiasi mempunyai anggota masing-masing sebanyak 187 anggota dan 161 anggota.

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM ASOSIASI (Lanjutan)

d. Susunan dan Tugas Pengurus Asosiasi

Berdasarkan akta notaris Ashoya Ratam, SH, MKn, No. 55 tanggal 25 Juni 2021 dan telah disetujui oleh seluruh anggota ASPI dalam Rapat Umum Anggota tanggal 25 Juni 2021 tentang Perubahan Susunan Badan Pengurus dan Badan Pengawas Asosiasi telah didaftarkan dan disetujui oleh seluruh Anggota ASPI sebagai perkumpulan yang berbadan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0001012.AH.01.08 tanggal 16 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Ketua Umum	: Santoso	Anggoro Eko Cahyo
Wakil Ketua	: Rico Usthavia Frans	Rico Usthavia Frans
Sekjen	: Handayani	Handayani
Wakil Sekjen	: Hariantono	Santoso
Bendahara	: Henry Iswaratioso	Sigit Prastowo
Wakil Bendahara	: Ir. Eddy Hadiyanto M.B.A.	Ir. Eddy Hadiyanto M.B.A.
Ketua Komite I	: Timothy Utama	Timothy Utama
Ketua Komite II	: Abraham J. Adriaansz	Abraham J. Adriaansz
Ketua Komite III	: Ari Yuanto Asah	Ari Yuanto Asah
Ketua Komite IV	: Soejanto Soetjijo	Soejanto Soetjijo
Ketua Komite V	: Ardhi Prabowo	Ardhi Prabowo
Direktur Eksekutif	: Susiana Suhendra	Susiana Suhendra
Direktur Eksekutif	: Djamin Edison Nainggolan	Djamin Edison Nainggolan
Direktur Eksekutif	: Yanti Puspa Rini	Yanti Puspa Rini

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Asosiasi telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2011. Oleh karena itu laporan keuangan tahun 2021 disajikan berdasarkan SAK ETAP.

Manajemen Asosiasi berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2021 dengan angka komparatif 2020 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratannya.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pembayaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Piutang Iuran

Piutang iuran disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih, yang diestimasi berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

d. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Biaya perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap. Setelah pengakuan awal, aset tetap diukur dengan model biaya.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan perlengkapan kantor	4 - 8 tahun
Pengembangan ruang gedung yang disewa	8 tahun

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya penggantian komponen suatu aset dan biaya inspeksi yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan perubahan aset bersih tahun yang bersangkutan.

e. Perpajakan

Asosiasi mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Asosiasi harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Asosiasi tidak mengakui adanya pajak tangguhan. Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Asosiasi mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

f. Imbalan Pasca Kerja

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca-kerja, seperti pensiun uang pesangon, uang penghargaan dan imbalan lainnya, dihitung berdasarkan "Peraturan Perseroan" yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 ("PP No. 35/2021").

Kewajiban imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan posisi keuangan dihitung berdasarkan nilai kini dari estimasi kewajiban imbalan pasca-kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar aset bersih dana pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *Projected unit-credit*.

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)

Ketika imbalan pasca-kerja berubah, porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu dibebankan atau dikreditkan ke dalam laporan perubahan aset bersih dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight line* - method) selama rata-rata sisa masa kerja karyawan hingga imbalan pasca-kerja menjadi hak karyawan (*Vested*). Imbalan pasca-kerja menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan perubahan aset bersih..

Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasca-kerja pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian diakui dengan menggunakan metode garis lurus selama sisa masa kerja rata rata karyawan. Jika tidak, keuntungan atau kerugian aktuarial tidak diakui.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan baik pendapatan iuran anggota maupun pendapatan lain-lain didasarkan pada akrual basis, yaitu pendapatan suatu periode diakui sebagai pendapatan walaupun belum diterima pembayaran per kas. Beban diakui pada saat terjadinya.

3. KAS DAN SETARA KAS

	2021	2020
Bank		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.676.319.511	8.671.650.032
PT Bank Central Asia Tbk	1.457.098.430	1.280.209.169
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	548.976.428	593.680.391
Jumlah Bank	<u>7.682.394.369</u>	<u>10.545.539.592</u>
Deposito berjangka		
PT Bank DKI	13.200.644.134	12.793.954.331
PT Bank BTN Batara Prima	11.221.065.070	-
PT Bank CIMB Niaga Syariah	771.879.206	749.256.297
Jumlah Deposito berjangka	<u>25.193.588.410</u>	<u>12.793.954.331</u>
Jumlah	<u>32.875.982.779</u>	<u>23.339.493.923</u>
Tingkat suku bunga per tahun	3 % - 4 %	4 % - 5 %

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ASET TETAP

	2021			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Harga Perolehan				
Peralatan dan perlengkapan kantor	1.061.769.514	586.321.341	-	1.648.090.855
Pengembangan ruangan gedung yang disewa	1.168.498.790	-	-	1.168.498.790
Jumlah	<u>2.230.268.304</u>	<u>586.321.341</u>	<u>-</u>	<u>2.816.589.645</u>
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan perlengkapan kantor	368.957.909	295.941.632	-	664.899.541
Pengembangan ruangan gedung yang disewa	581.709.160	146.062.349	-	727.771.509
Jumlah	<u>950.667.070</u>	<u>442.003.981</u>	<u>-</u>	<u>1.392.671.050</u>
Nilai Buku	<u>1.279.601.234</u>			<u>1.423.918.595</u>
	2020			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Harga Perolehan				
Peralatan dan perlengkapan kantor	452.459.136	609.310.378	-	1.061.769.514
Pengembangan ruangan gedung yang disewa	1.168.498.790	-	-	1.168.498.790
Jumlah	<u>1.620.957.926</u>	<u>609.310.378</u>	<u>-</u>	<u>2.230.268.304</u>
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan perlengkapan kantor	240.635.481	128.322.429	-	368.957.909
Pengembangan ruangan gedung yang disewa	435.646.812	146.062.349	-	581.709.160
Jumlah	<u>676.282.293</u>	<u>274.384.777</u>	<u>-</u>	<u>950.667.070</u>
Nilai Buku	<u>944.675.633</u>			<u>1.279.601.234</u>

Beban penyusutan sebesar Rp 442.003.981 dan Rp 274.384.777 pada tahun 2021 dan 2020 dibebankan pada beban umum dan administrasi (Catatan 13).

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. ASET TAK BERWUJUD

	2021			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Harga Perolehan				
Perangkat lunak	2.617.779.000	-	-	2.617.779.000
Akumulasi Penyusutan				
Perangkat lunak	493.957.167	505.969.875	-	999.927.042
Nilai Buku	2.123.821.833			1.617.851.958
	2020			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Harga Perolehan				
Perangkat lunak	1.100.099.000	1.517.680.000	-	2.617.779.000
Akumulasi Penyusutan				
Perangkat lunak	293.634.166	200.323.001	-	493.957.167
Nilai Buku	806.464.834			2.123.821.833

Aset tidak berwujud memiliki umur manfaat selama 8 tahun dengan menggunakan tarif 12,5 % dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

6. JAMINAN

	2021	2020
Sewa	428.076.000	428.076.000
Telepon	9.000.000	9.000.000
Jumlah	437.076.000	437.076.000

7. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2021	2020
Bonus	1.102.375.000	859.546.905
Jasa profesional	69.850.000	59.000.000
Lain-lain	271.549.832	93.806.736
Jumlah	1.443.774.832	1.012.353.641

8. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	2021	2020
PPN	-	5.376.709

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Hutang Pajak

	2021	2020
PPN	157.065.708	-
PPh pasal 4 (2)	28.500.000	28.500.000
PPh pasal 21	875.613.096	534.939.231
PPh pasal 23	1.210.623	15.980.924
PPh pasal 25	12.675.417	6.512.250
PPh pasal 29	1.663.504.971	1.759.875.646
Jumlah hutang pajak	2.738.569.815	2.345.808.051

c. Pajak Kini

	2021	2020
Kenaikan aset bersih	8.996.150.473	5.416.189.707
Beda tetap		
Imbalan pasca-kerja	429.921.431	4.511.123.219
Beban pengobatan	308.338.960	169.169.493
Beban pulsa telepon selular	7.713.472	6.905.395
Penyusutan aset tetap	79.146	40.112
Pendapatan bunga bank dan deposito	(756.643.688)	(457.013.009)
Beban lain - lain	143.082.113	176.907.256
Penghasilan kena pajak	9.128.641.908	9.823.322.173
Pembulatan	9.128.641.000	9.823.322.000

Perhitungan taksiran pajak penghasilan

Fasilitas	1.716.186.781	2.305.617.106
Tanpa fasilitas	7.412.454.219	7.517.704.894
Jumlah pendapatan kena pajak	9.128.641.000	9.823.322.000

Beban pajak		
Fasilitas	188.780.546	253.617.882
Tanpa fasilitas	1.630.739.928	1.653.895.077
Jumlah beban pajak kini	1.819.520.474	1.907.512.958

Kredit pajak		
PPh pasal 23	22.400.000	12.640.000
PPh pasal 25	133.615.503	134.997.312
Jumlah Kredit Pajak	156.015.503	147.637.312

Jumlah Kurang/(Lebih) Bayar Pajak	1.663.504.971	1.759.875.646
--	----------------------	----------------------

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Perusahaan memberikan program manfaat PHK karyawan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Perusahaan setiap tahun mencadangkan imbalan kerja kepada peserta pegawai yang akan pensiun guna memberikan kompensasi atas hak ganti rugi, pesangon dan penghargaan masa kerja sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2021.

Penilaian liabilitas manfaat pegawai dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria Padma Aktuarial Consulting per 31 Desember 2021 dan 2020, dengan perhitungan sebagai berikut:

	2021	2020
Tingkat diskonto	5,75%	5,91%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	4%	6%
Usia pensiun normal (tahun)	55, 60, dan 67 Tahun	55, 60, dan 67 Tahun
Mortality	100% TMI3	100% TMI3

Rekonsiliasi aset (liabilitas) manfaat kesejahteraan karyawan adalah sebagai berikut:

Jumlah liabilitas yang belum diakui di neraca:

	2021	2020
Nilai kini liabilitas manfaat karyawan	4.941.044.650	4.511.123.219
Nilai wajar aset program manfaat karyawan	-	-
Liabilitas program manfaat karyawan	<u>4.941.044.650</u>	<u>4.511.123.219</u>

Beban manfaat karyawan pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Beban jasa kini	1.382.168.850	1.767.213.179
Beban jasa lalu	(15.809.031)	-
Beban bunga	254.114.797	212.851.221
Pengakuan tahun sebelumnya	-	3.027.540.305
Keutungan aktuarial	<u>(877.083.835)</u>	<u>(496.481.486)</u>
Jumlah	<u>743.390.781</u>	<u>4.511.123.219</u>

Perubahan pada liabilitas yang diakui di neraca:

	2021	2020
Kewajiban awal tahun	4.511.123.219	-
Pembayaran manfaat	(313.469.350)	-
Beban imbalan kerja yang dapat diakui pada tahun	<u>743.390.781</u>	<u>4.511.123.219</u>
Liabilitas akhir tahun	<u>4.941.044.650</u>	<u>4.511.123.219</u>

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PENDAPATAN

	2021	2020
MDR debit	13.516.778.804	10.726.873.328
Iuran anggota	6.677.200.000	5.493.000.000
Fungsi sertifikasi	4.670.605.075	2.840.138.823
MDR qris	667.297.198	-
NSICC specification	-	1.390.888.168
Jumlah	<u>25.531.881.077</u>	<u>20.450.900.319</u>

11. BEBAN PROYEK

	2021	2020
Biaya Rapat Urusan Anggota	381.259.000	163.567.901
Lainnya	-	2.746.235
Jumlah	<u>381.259.000</u>	<u>166.314.136</u>

12. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2021	2020
Gaji dan upah	11.877.974.783	7.669.089.638
Sewa	1.140.000.000	1.140.000.000
Imbalan Pascakerja	743.390.781	4.511.123.219
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	572.670.285	317.611.636
Amortisasi (Catatan 5)	505.969.875	200.323.001
Penyusutan (Catatan 4)	442.003.980	274.384.777
Alokasi kesehatan	308.338.960	169.169.493
Jasa profesional	136.250.000	292.048.500
Internet	109.062.000	90.302.621
Alat tulis dan kebutuhan kantor	105.237.392	110.093.519
Pengiriman surat dan dokumen	74.674.323	61.134.514
Pemeliharaan	51.195.018	28.281.500
Rapat kantor	27.292.414	86.340.297
Telepon	19.449.538	20.097.386
Transportasi	11.989.480	29.896.995
Lain-lain	428.428.560	323.313.892
Jumlah	<u>16.553.927.389</u>	<u>15.323.210.988</u>

13. LIABILITAS KONTINJENSI

Asosiasi tidak mempunyai liabilitas kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2021.

14. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Asosiasi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan terlampir yang telah diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2022.



Sekretariat ASPI

Gd. Graha Mandiri Lt. 18

Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat 10310

Telp: (62-21) 230 1947 / (62-21) 230 1829

Fax: (62-21) 230 0393

Email: sekretariat@aspi-indonesia.or.id

Website: www.aspi-indonesia.or.id